

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang besar dan luas, dan merupakan negara yang masih dalam tahap berkembang. Negara berkembang itu sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan negara dengan kesejahteraan tingkat rendah. Negara berkembang merupakan negara yang ciri-cirinya antara lain, pertanian tradisional merupakan faktor produksi primer, industri belum berkembang, jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk besar, pendapatan per kapita rendah, serta sumber alam belum banyak yang terolah.¹

Hakikatnya suatu negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, begitu pula pada negara berkembang. Pada negara berkembang yang paling dicita-citakan adalah menjadi sebuah negara maju yang adil dan berkedautan rakyat. Dalam prosesnya perlu banyak usaha dari pihak manapun untuk mewujudkannya. Seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada paragraf empat yang berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹ “Negara Berkembang” dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara%20berkembang> diakses 11 April 2019

Proses untuk menuju menjadi negara maju bukanlah hal yang sederhana. Banyak hal yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Beberapa aspek yang dijadikan sebagai tolak ukur suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju diantaranya pendapatan perkapita tinggi; angka pertumbuhan penduduk rendah; usia harapan hidup tinggi (bisa mencapai 80 tahun); tingkat pendidikan penduduk tinggi; sumber daya manusia unggul; sarana transportasi dan komunikasi maju; mempunyai indeks pembangunan manusia tinggi; serta keadaan ekonomi stabil dan mengalami kemajuan.²

Pada saat ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dan menjadi sasaran utama pembangunan bagi banyak negara berkembang. Pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian tingkat kesejahteraan hidup yang tinggi bagi penduduknya. Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu daerah atau negara setidaknya mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tinggi dapat dilihat dari perubahan PDRB tahun tertentu dengan PDRB tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode

² Wiwik Sri Utami dan Aida Kurniawati, *Negara Maju dan Berkembang*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), hal.4

tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.³

Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal.⁴ Infrastruktur sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana pencipta hubungan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam rangka mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi, kebijakan yang lazim dilakukan oleh kebanyakan negara berkembang adalah meningkatkan dan mempercepat pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi antar wilayah.⁵ Melalui pembangunan dan perluasan jaringan dan prasarana transportasi diharapkan akan dapat mendorong mobilitas barang dan faktor produksi antar wilayah secara spontan.

Memacu akselerasi pembangunan infrastruktur bukanlah tanpa alasan, ahli ekonomi pembangunan, Rosentein-Rodan misalnya, sejak lama telah mengampanyekan pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, sebagai pilar pembangunan ekonomi yang dikenal kemudian dengan

³ *Produk Domestik Regional Buto (PDRB) Kabupaten Tulungagung menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015*, (Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung), hal. 2

⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 423

⁵ Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal.84

nama *big-push theory*.⁶ Beberapa hasil studi juga menyebutkan hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai *social overhead capital* yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketersediaan modal fisik sangat terkait dengan ketersediaan dana investasi. Nilai Investasi yang tinggi akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian bangsa dan sebaliknya jika investasi rendah maka akan menghambat pembangunan dan implikasinya adalah jumlah pengangguran secara otomatis juga akan meningkat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diperlukan adanya peningkatan nilai penanaman modal. Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat. Namun pembentukan modal domestik di Indonesia masih rendah, sehingga masih diperlukan peranan ekspor dan investasi asing.⁷

Ekspor merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kegiatan ekspor yaitu sistem perdagangan dengan cara memperdagangkan barang-barang dan jasa-jasa dari suatu daerah ke daerah lain dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Peningkatan ekspor akan

⁶Humas, “Percepatan Infrastruktur dan Transformasi Ekonomi Indonesia” dalam <https://setkab.go.id/percepatan-infrastruktur-dan-transformasi-ekonomi-indonesia/> diakses 11 April 2019

⁷ Nuraini, “Analisis Pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Povinsi Jambi”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 16 Tahun 2016*, hal. 88

meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menjadi indikator peningkatan PDRB.⁸

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.⁹ Dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal.¹⁰

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meringankan beban dunia usaha. Prioritas pertama, pemerintah meminta pemda memberikan fasilitas dan kemudahan agar usaha bisa tetap berjalan baik. Prioritas kedua adalah peningkatan pembangunan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia untuk mengatasi gelombang pengangguran, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, energi, perhubungan dan perumahan. Selain akan menyerap tenaga kerja, proyek infrastruktur juga membuat perekonomian akan bergerak.

⁸ Ateng Piater Sinaga Dan Elvis F. Purba, "Pengaruh Ekspor Terhadap Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan (Analisis Basis Ekonomi) Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Nommensen Volume V Januari 2014*, hal. 42

⁹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah" dalam <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/33.pdf> diakses 11 April 2019

¹⁰ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah" dalam <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-uu-no-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/UU-228-263-UNDANG>

[UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-uu-no-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/UU-228-263-UNDANG) diakses 11 April 2019

Untuk ini anggaran infrastruktur akan diprioritaskan pengalokasiannya dalam APBN dan APBD. Diharapkan dengan cara tersebut pengangguran dapat teratasi dan dikurangi, serta infrastruktur perekonomian yang diperlukan untuk menggerakkan sektor riil bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Prioritas ketiga adalah upaya pemerintah pusat dan daerah melindungi dan membantu meringankan beban golongan menengah kebawah yang mengalami kesulitan di bidang perekonomian.

Namun demikian, perkembangan pembangunan perekonomian daerah tergantung dari kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki masing-masing daerah. Pembangunan daerah lebih memprioritaskan kepada membangun dan memperkuat sektor-sektor dibidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya yang ada secara optimal dengan tetap memerhatikan kesinergian antar sektor-sektor perekonomian.

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung dapat menjadi indikator pesatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun. PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu tertentu (satu tahun) di wilayah regional tertentu, dalam kasus ini adalah Kabupaten Tulungagung. Sehingga, sebagai daerah otonom, Kabupaten Tulungagung dituntut dapat meningkatkan potensi atau sumber-sumber daerah terutama dari sektor infrastruktur jalan, investasi, dan ekspor.

Tabel 1.1
Perkembangan Infrastruktur Jalan, Ekspor dan PDRB
di Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017

Tahun	Infrastruktur Jalan (KM)	Ekspor (Rp)	PDRB (Jutaan Rp)
2013	1.482,22	11.449.426.000	23.264.335,19
2014	1.517,00	9.411.781.000	25.810.296,01
2015	1.549,86	24.189.718.000	28.415.295,14
2016	1.645,32	41.044.421.380	31.127.236,80
2017	1.651,98	22.567.462.105	33.740.178,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Infrastruktur jalan, dan ekspor mempunyai pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Namun belakangan terdapat banyak kontradiksi dalam teori dan penerapannya, maka yang akan diteliti dan dibahas dalam tulisan ini adalah dengan mengangkat judul “Pengaruh Infrastuktur Jalan, dan Ekspor terhadap Produk Domestik Regional Bruto Tulungagung Tahun 1988-2017.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Indonesia masih merupakan negara berkembang.
2. Pertumbuhan ekonomi yang ada belum mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan, kemiskinan, pengangguran dan permasalahan lainnya.
3. Pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, sebagai pilar pembangunan ekonomi.

4. Peningkatan ekspor akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi obyek analisis penelitian yaitu:

1. Apakah infrastruktur jalan berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto?
2. Apakah ekspor berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto?
3. Apakah infrastruktur jalan, dan ekspor secara bersama-sama berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap produk domestik regional bruto
2. Untuk menganalisis pengaruh ekspor terhadap produk domestik regional bruto
3. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur jalan, dan ekspor secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberkan pemahaman bagi pembaca dan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk lembaga

Sebagai sumbangsih bagi lembaga dalam mengambil kebijakan dalam proses peningkatan produk domestik bruto

b. Untuk akademik

Untuk sumbangsih perbendaharaan perpustakaan di IAIN Tulungagung

c. Untuk peneliti selanjutnya

Sebagai rujukan peneliti selanjutnya dengan tema sama tapi dengan variabel yang berbeda

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada insfrastruktur jalan, ekspor dan produk domestik regional bruto Tulungagung dalam kurun waktu 1988-2017
2. Data yang dipergunakan tebatas pada data yang tersedia di buku Tulungagung Dalam Angka oleh BPS dan lembaga-lembaga terkait lainnya

G. Penegasan Istilah

1. Konseptual

a. Infrastruktur

Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.¹¹

b. Ekspor

Ekspor adalah penjualan suatu produk yang dilakukan oleh suatu bangsa atau perusahaan ke luar negeri dengan harapan akan memperoleh keuntungan dalam bentuk mata uang asing.¹²

c. Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun persentase. berdasarkan data beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari administrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder)

¹¹ Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus, "Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), hal. 225

¹² Irham Fahmi, *Ekonomi Politik: Teori dan Realita*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hal.192

2. Operasional

Produk domestik bruto merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai apakah sebuah negara sudah bisa dikatakan sebagai negara yang telah maju secara ekonominya dan masyarakatnya telah semakin baik dan merupakan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Upaya dalam mempercepat kegiatan ekonomi dalam upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah mengembangkan infrastruktur, meningkatkan investasi baik dari penanaman modal asing dan utang luar negeri dan yang terakhir adalah dengan meningkatkan ekspor.

Peningkatan infrastruktur sendiri dalam hal ini infrastruktur jalan merupakan suatu langkah nyata yang telah dilakukan dan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam proses peningkatan infrastruktur bukan merupakan hal yang mudah, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Kegiatan ekspor juga memberikan keuntungan terhadap pemerintah karena memperoleh pendapatan yaitu devisa negara. Semakin banyaknya kegiatan ekspor maka semakin besar perolehan devisa negara. Dengan devisa yang meningkat hal ini akan mampu untuk menyumbang peningkatan produk domestik bruto pada periode berjalan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat untuk memudahkan dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian ini, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori. Bab ini menjelaskan kerangka teori yang membahas dari masing-masing variabel yang diteliti, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian. Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, sampling penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, serta analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V Pembahasan. Bab ini menjelaskan temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian

BAB VI Penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran-saran dari penulis mengenai penelitian.